

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek

1.1.1. Krisis Eksistensi Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta



Gambar 1 Eksistensi Fasilitas Ruang Terbuka Publik di Yogyakarta

sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2020, grafis diolah oleh Penulis, 2021

Fasilitas mengalami krisis kuantitas dan kualitas seiring tingginya laju perubahan penggunaan lahan dan kepadatan bangunan pada kawasan perkotaan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta pada tahun 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami fenomena kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta saat ini mencapai luas sebesar 7,475 km² atau 23% dari total luas Kota Yogyakarta dengan proporsi 8,12% untuk RTH publik dan 15,4% untuk RTH privat. Angka tersebut kurang dari standar yang ditetapkan pemerintah lewat Perda Kota Yogyakarta no 2 Tahun 2010, yaitu 30% dengan rincian 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat.

Tabel 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	Pertumbuhan Rata - Rata (% / Tahun)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	618,15	619,189	619,405	189,628	190,467	-17,185
2.	Luas wilayah ber HPL	Ha	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	0,000
3.	Luas wilayah ber HGB	Ha	102,266	130,11	138,26	157,63	183,03	15,904
4.	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL		72,55	72,67	72,70	22,26	22,36	-17,187
5.	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HGB		6,04	4,76	4,48	1,20	1,04	-28,392

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2019

Karakter Kota Yogyakarta cenderung identik dengan kota tradisional yang dibentuk dan dibangun oleh penguasa pada saat mendirikan pusat-pusat kerajaan. Dalam perkembangan perencanaan wilayah kotanya setelah melewati masa penjajahan, Kota Yogyakarta mengalami modifikasi menjadi bersifat terbuka dan heterogen. Namun perkembangan kota yang terpusat dan pembagian kawasan yang tidak teratur menyebabkan ruang-ruang publik terbuka hijau terlupakan. Sekarang ini, produk ruang publik Kota Yogyakarta yaitu Alun-Alun Utara yang berada di Sumbu Filosofi Jogja mengalami perubahan regulasi dari yang dulunya bisa

digunakan publik menjadi privat dengan dibangunnya tembok pagar. Hal ini menjadi isu yang hangat pada warga Yogyakarta mengingat Alun-Alun Utara menjadi salah satu ruang interaksi sosial dan ruang kebudayaan masyarakat. Hal ini menjadi pertanyaan dimana warga Jogja akan melangsungkan interaksi sosial dan kebudayaan bila ruang publik yang ada diprivatisasi.

1.1.2. Kelurahan Gowongan sebagai Bagian dari Kawasan Historis Kota Yogyakarta

Kelurahan Gowongan merupakan bagian dari Kawasan Malioboro yang menjadi salah satu penggal Sumbu Imajiner dimana merupakan destinasi wisata utama di Kota Yogyakarta. Pada Kelurahan Gowongan ini terdapat Monumen Tugu yang menjadi landmark kota yang paling terkenal. Karakteristik kawasan Kelurahan Gowongan yang berada di Jalan Margo Utomo identik dengan Kawasan Malioboro dengan langgam arsitektur bangunan indis kolonial. Karya arsitektur yang terkenal pada kawasan ini antara lain Stasiun Tugu yang hingga kini masih aktif menjadi penyedia sarana akomodasi. Di seberang Stasiun Tugu terdapat bangunan cagar budaya Hotel Tugu yang dahulu memiliki peran vital dalam sejarah kemerdekaan, namun saat ini tidak terawat dan terbengkalai. Secara keseluruhan, pola aktivitas di Kelurahan Gowongan cenderung tidak merata oleh karena pusat aktivitas hanya berada di area Monumen Tugu dan Stasiun Tugu.

1.1.3. Pengembangan Ruang Ruang Publik Berkelanjutan di Kawasan Malioboro

Kawasan Malioboro telah menjadi bagian penting dalam keberlangsungan Kota Yogyakarta dari aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Namun kekurangan kawasan pada saat ini adalah kurangnya perhatian khusus terhadap pelestarian lingkungan. Beberapa upaya seperti pembuatan aturan pembatasan akses kendaraan bermotor, perancangan *pedestrian oriented design*, dan pengadaan kantong parkir tidak menyelesaikan permasalahan secara tepat. Pengembangan kawasan Kawasan Malioboro yang hanya terpusat pada sepanjang Jalan Malioboro saja menyebabkan kesenjangan bagi area-area di sekitarnya. Padahal terdapat potensi-potensi lain yang mampu mendorong Kawasan Malioboro menjadi kawasan berkelanjutan dengan prinsip *People, Planet, dan Profit*. Potensi tersebut antara lain seperti pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya, peletakan area hijau, mensinergikan area pariwisata, perencanaan mitigasi kebencanaan, dan pewadahan infrastruktur kawasan. Kelurahan Gowongan dapat menjadi area pengembangan Kawasan Malioboro sebagai bentuk pemerataan aktivitas kota.

1.2. Isu Desain

Isu utama pada topik ruang publik di Kota Yogyakarta adalah krisis RTHP sebesar $\pm 11.8\%$ dari total luas wilayah Kota Yogyakarta. Dalam konteks perancangan ruang publik, interaksi sosial menjadi hal terpenting dimana fenomena yang terjadi pada interaksi sosial Kawasan Malioboro hanya terpusat pada bagian selatan pada Jalan Malioboro, Margo Mulyo,

dan Jalan Pangurakan. Hal ini disebabkan kurangnya peletakan *node* pada Jalan Margo Utomo sebagai wadah untuk wisatawan maupun warga sekitar untuk berinteraksi maupun sebagai impresi gerbang awal pada Stasiun Tugu. Keterkaitan Kawasan Malioboro dengan area pelingkup di sekitarnya juga menjadi isu ruang kota yang berkelanjutan.

1.3. Latar Belakang Permasalahan Desain Arsitektur

1.3.1. Diskoneksi Antar Ruang Terbuka Publik Pada Kawasan Gowongan Sekitarnya

Persebaran ruang publik di Malioboro dominan berada di selatan dan kurang merata pada Jalan Margo Utomo yang masih didominasi bangunan komersial dan hotel. Kurangnya RTH publik Kota Jogja sebagai *nodes* dan titik temu para wisatawan berhenti dan berinteraksi setelah berjalan baik dari arah Tugu maupun dari Stasiun Tugu maupun interaksi dan aktivitas sosial warga Yogyakarta. Hal ini bertolak belakang dengan visi *grand design master plan* Malioboro sebagai teras budaya masyarakat Yogyakarta. Budaya Jogja diwujudkan ke ruang publik secara ekologi, edukasi, ruang publik yang menceritakan perubahan malioboro dari waktu ke waktu. Pada Kelurahan Gowongan terdapat lahan terbengkalai yang berpotensi menghidupkan kegiatan berwisata sekaligus berdampak pada kehidupan masyarakat Gowongan di bantaran Sungai Code. Lahan yang terbengkalai menjadi jukstaposisi diantara fungsi yang kontras yaitu area komersial wisata dengan area pemukiman, maupun adanya bangunan cagar budaya Hotel Toegoe pada bagian selatan.

1.3.2. Hilangnya *Spirit of Place* pada BPCB Hotel Tugu sebagai *Landmark* Kawasan

Bangunan Peninggalan Cagar Budaya (BPCB) Hotel Tugu yang berada di Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadi landmark pada kawasan Margo Utomo maupun sebagai impresi gerbang awal dari Stasiun Tugu. Matinya *spirit of place* pada BPCB Hotel Tugu dikarenakan fungsi bangunan pada perkembangannya tidak bisa beradaptasi dengan kebutuhan kawasan serta *image* hotel sebagai bencana lingkungan pada warga Gowongan menjadikan bangunan terbengkalai sehingga nilai historis yang ada pada BPCB Hotel Tugu kian memudar. Keberadaan BPCB Hotel Tugu menjadi jukstaposisi fungsi kontras komersial, pemukiman, serta historis menjadi potensi adanya ruang publik dengan identitas lokal menyeluruh dengan fungsi sosial, edukatif, dan lingkungan yang selaras dengan visi misi Malioboro di masa depan sebagai ruang komunitas dan komersial modern pada daerah tujuan wisata.

1.3.3. Privatisasi Pedestrian Margo Utomo oleh Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Pedestrian merupakan sebuah ruang jalan bagi pejalan kaki untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pedestrian Margo Utomo sebagai salah satu dari segmen pada Sumbu Filosofi Jogja mengalami fenomena isu privatisasi ruang publik pedestrian menjadi jalur angkringan dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Angkringan dan PKL menjadi identitas kuliner

jalan Yogyakarta tetapi keberadaannya membatasi akses pedestrian Margo Utomo sebagai lahan milik publik sehingga mengganggu sirkulasi pedestrian. Privatisasi terjadi saat pagi dan sore menjelang malam hari dimana pedestrian digunakan sebagai angkringan warung tenda pada pagi hari dan sebagai angkringan kopi joss pada sore menjelang malam hari. Di beberapa titik pedestrian Margo Utomo alih fungsi menjadi lapak kuliner terjadi hingga memakan sebagian badan jalan. Sebagian pinggir jalan digunakan sebagai tempat parkir kendaraan yang ingin makan pada angkringan tersebut. Faktor penyebab privatisasi pedestrian Margo Utomo ini dikarenakan antara lain keterbatasan modal membuka fasilitas fisik angkringan dan aglomerasi dimana lokasi Margo Utomo menjadi sentra komunitas 12 Angkringan Kopi Joss sehingga memungkinkan banyaknya pelanggan yang datang.

1.3.4. Peletakan Node Baru di Kelurahan Gowongan dalam Proses Regenerasi Urban

Jalan Margo Utomo sebagai salah satu segmen Sumbu Filosofi Jogja penuh sesak dengan bangunan komersial. Pemberian *node* sebagai jeda ruang di antara bangunan memberikan ruang untuk berhenti dan interaksi warga, komunitas, serta wisatawan. Regenerasi Urban atau *Urban Regeneration* adalah upaya menghidupkan kota dengan menjaga identitas sejarah dan karakternya dalam melakukan pengembangan wilayah. Konsep peremajaan pada BPCB Hotel Tugu menjadi salah satu bentuk dari proses *Urban Regeneration* yang mampu menjawab potensi nilai sejarah dan diadaptasikan dalam bentuk baru. Revitalisasi kawasan kampung wisata juga dapat upaya penting dalam mengintegrasikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan warga setempat. Peletakan node tentunya berhubungan dengan visi misi kota berkelanjutan yang mengedepankan konsep *Walkable City*. Sehingga adanya node tidak hanya memberikan pemerataan pusat aktivitas, namun juga mendorong pengadaan area hijau.

1.4. Rencana Pendekatan Desain

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kawasan Gowongan dan sekitarnya pendekatan *Place Theory* dipilih sebagai rencana pendekatan desain untuk menyelesaikan permasalahan pembentukan public place pada kawasan. *Place Theory* merupakan ilmu perancangan kota yang mempelajari struktur dan pola ruang kota berupa figure dan ground serta linkage yang pembentukannya berubah seiring waktu tertentu.

1.5. Rumusan Masalah

Bagaimana masterplan multi hub public place di kawasan Gowongan sekitarnya yang berkelanjutan dan berketahanan dengan pendekatan *place theory*?

1.6. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1.6.1. Tujuan

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh konsep masterplan multi hub public place berupa *linkage* dan *node* yang menghubungkan antar ruang terbuka publik secara fisik maupun visual yang menggabungkan fungsi *sociability, uses and activities, comfort and image, access and linkage* sehingga mendorong terciptanya kawasan berkelanjutan.

1.6.2. Sasaran Pembahasan

Sasaran Pembahasan dalam Penulisan ini adalah:

- Mengkaji sistem plaza dan *linkage* sebagai ruang terbuka publik yang berdampak baik pada morfologi, ekologis, komunitas, dan ekonomi kawasan.
- Melakukan observasi prinsip perancangan plaza sebagai ruang terbuka publik.
- Melakukan analisis potensi dari aspek fisik dan non fisik dalam perancangan.
- Merumuskan konsep perancangan plaza sebagai ruang terbuka publik dengan menggunakan pendekatan *place theory*.

1.7. Sistematika Penulisan

- **Bab 1 Pendahuluan**

Berisi paparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, keaslian penulisan, metode pembahasan, sistematika penulisan, dan kerangka berpikir.

- **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Berisi paparan mengenai tinjauan mengenai ruang publik dan pendekatan *place theory*.

- **Bab 3 Tinjauan Objek**

Berisi paparan mengenai tinjauan lokasi, analisis tapak, dan analisis ruang yang akan digunakan sebagai lokasi perancangan.

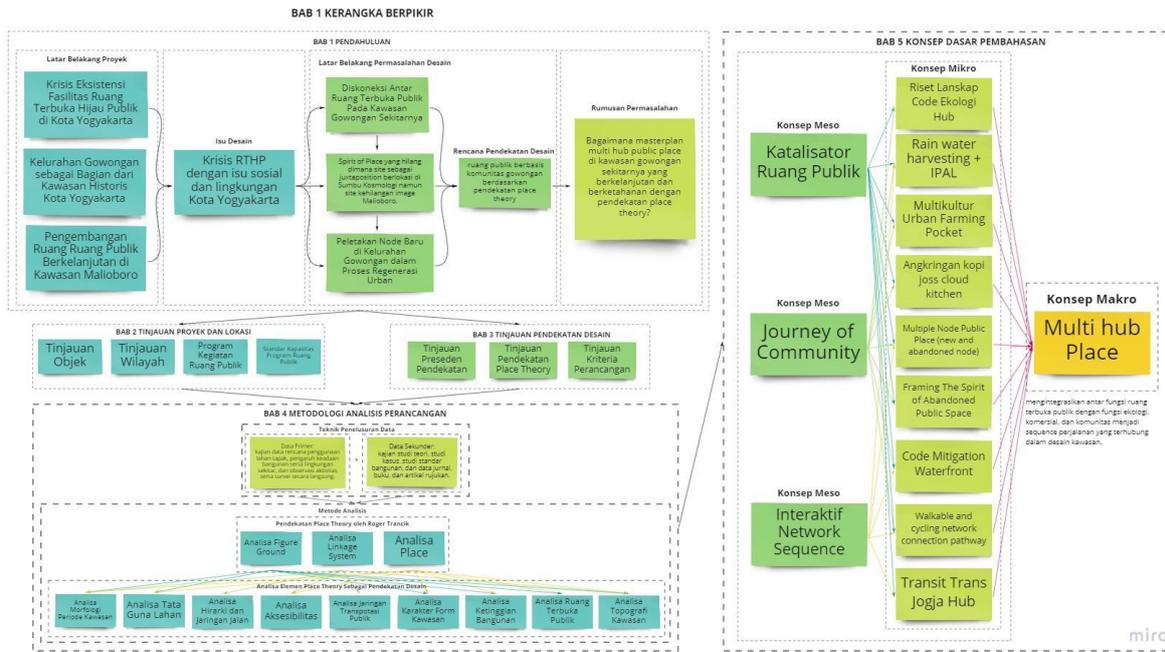
- **Bab 4 Metode dan Analisis Perancangan**

Berisi kerangka berpikir analisis dari data yang telah dirangkum untuk diaplikasikan pada perancangan konsep ruang publik.

- **Bab 5 Konsep Perancangan**

Berisi paparan konsep perancangan bangunan ruang publik dengan pendekatan *place theory*.

1.8. Kerangka Berpikir Desain



Gambar 2 Kerangka Berpikir
sumber: analisis Penulis, 2021

